

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Ardiwilaga, R. Roestandi, 1960, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbitan Masa Baru, Jakarta.
- Darmodiharja, Darji dan Shidarta, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen dalam Negeri dan Fakultas Hukum UGM, 1978, *Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yurisdiksi UUPA*, Laporan Penelitian.
- Erwiningsih, Winahyu, 2009, *Hak Menguasai Negara atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1977, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hadi, Soetrisno, 1995, *Metodologi Research*, Andi Ofset, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi 2008, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Iskandarsyah, Mudakir, 2010, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2011, *HUKUM ADAT (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Inonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Ruchiyat, Eddy, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudiyat, Iman, 1978, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

-----, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.

Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winami, 1998, *Petani dan Konflik Agraria*, AKATIGA, Bandung.

Sumardjono, Maria S.W, 2001, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Susan, Novri 2009, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Wijardjo, Boedhi, Ichsan Malik, Noer Fauzi, dan Antoinette Royo, 2001, *Konflik, Bahaya, atau Peluang? Panduan Latihan Menghadapi dan Menangani Konflik Sumber Daya Alam*, Kerjasama BP-KPA dengan BSP Kemala, Bandung.

#### **b. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau

Kuasanya, Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Lembaran Negara Nomor 61 Tahun 1963, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 2015.

Keputusan Kepala BPN No.34/2007 Juknis 1/D.V/07 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Konflik

**c. Karya Ilmiah**

Diasari, Ratih, “Pemetaan Konflik Pertanahan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Sorong Selatan”, *Penulisan Hukum/Skripsi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2010.

Kurniawan, Muhammad Hari, ”Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak di Tepi Sungai Gajahwong Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman” , *Penulisan Hukum/Skripsi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2005.

Sucibudiati, Widya, “Dinamika Konflik Tanah Antara Perhutani dan Masyarakat di Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek”, *Penulisan Hukum/Skripsi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2007.

**d. Internet**

RidwanAZ, “Pengertian Penelitian Deskriptif – Penelitian Deskriptif adalah”, <http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/> , diakses tanggal 29 Agustus 2015.

Naskah perlombaan “Kekayaan Sumber Daya Alam sebagai “Kutukan”? Reaktualisasi UUPA dalam Mengatasi Berbagai Konflik Pertanahan dan Mewujudkan Harmoni Sosial Indonesia.”, [www.Bpnri.ac.id](http://www.Bpnri.ac.id), diakses tanggal 29 Agustus 2015.